

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



Nama : Mita Tia Ayu Lestari

NIM : 222017156

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Mita Tia Ayu Lestari
NIM : 222017156**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita Tia Ayu Lestari
NIM : 222017156
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Starata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, September 2021



Mita Tia Ayu Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
Nama : Mita Tia Ayu Lestari
NIM : 222017156
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I.



Dr. Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Diterima dan Disahkan
Palembang, September 2021
Pembimbing II.



Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM: 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jalan hidup tidak mudah tak masalah jika kamu berjalan dengan lambat kamu boleh istirahat tapi tidak menyerah dan berentih berusaha maka jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar dan percayalah bahwa bersama beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan”.

(Mita Tia Ayu Lestari)

**Terucap syukur kepada Allah SWT,
Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ **Kedua orang tuaku yang selalu mendoakanku dan berjuang keras untuk pendidikanku.**
- ❖ **Keluarga besar ku yang selalu memberi semangat.**
- ❖ **Adik-adik kandungku yang selalu mensupportku**
- ❖ **Dosen Pembimbingku**
- ❖ **Kekasihku**
- ❖ **Sahabat dan teman seperjuanganku menuntut ilmu**
- ❖ **Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs. Sunardi, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membantu membimbing dan mengarahkan terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Mizan, S.E.,AK,M.Si.,CA selaku dosen pembimbing II yang telah memberi semangat, dukungan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Penelaah satu, Penelaah dua, serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang tua tercinta ibu saya Meri Wati dan Bapak saya Tarmizi yang selalu mendukung dan mendoakanku di setiap waktu. Serta adik-adik kandungku yang selalu mendukung dan memberi semangat.
8. Keluarga besar yang selalu mendampingi ku dalam suka dan duka.
9. Kekasihku yang selalu mendoakan serta memberikanku semangat dan selalu mendukungku.
10. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikanku dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kampus hijau tercinta universitas muhammadiyah palembang yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mita Tia Ayu Letari'.

Mita Tia Ayu Letari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Teori Agensi	12
2. Sistem Pengendalian Intern	13
a. Pengertian Pengendalian Intern.....	13
b. Tujuan Pengendalian Intern	15

c. Komponen Pengendalian Intern	15
d. Kelemahan Pengendalian Intern.....	15
e. Indikator Kelemahan Pengendalian Intern.....	17
3. Ukuran Pemerintah Daerah.....	18
a. Indikator Ukuran Pemerintah Daerah.....	20
4. Pendapatan Asli Daerah.....	21
a. Indikator Pendapatan Asli Daerah	22
5. Belanja Modal.....	23
a. Indikator Belanja Modal.....	25
6. Kompleksitas.....	26
a. Indikator Kompleksitas	28
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Hipotesis.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasional Variabel.....	37
D. Data Yang Diperlukan	38
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	41
1. Analisis Data.....	41
2. Teknik Analisis	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Sejarah Tentang Provinsi Sumatera Selatan	52
2. Sejarah Tentang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	56
3. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	57
4. Visi Dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	61
5. Deskripsi Sampel Penelitian.	61
6. Hasil Pengolahan Data.....	63
B. Pembahasan.....	78

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah kelemahan Pengendalian Internal kabupaten/kota provinsi sumatera selatan tahun 2017 – 2019	7
Tabel II.1 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya.....	32
Tabel III.1 Operasional variabel penelitian.....	37
Tabel IV.1 Sampel penelitian.....	62
Tabel IV.2 Statistik deskriptif	64
Tabel IV.3 Hasil uji kolmogorov-smirnov.....	67
Tabel IV.4 Hasil uji multikoneritas	68
Tabel IV.5 Hasil uji autokorelasi	71
Tabel IV.6 Hasil uji regresi linear berganda	72
Tabel IV.7 Hasil uji koefisien determinasi	74
Tabel IV.8 Hasil uji f	75
Tabel IV.9 Hasil uji t	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	60
Gambar IV.1 P-P Plot Uji Normalitas	66
Gambar IV.2 Scatterplot	70

ABSTRAK

Mita Tia Ayu Lestari / 222017156 / 2021 / Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah . Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah dari temuan kasus kelemahan pengendalian intern hasil audit BPK RI, data laporan keuangan dari BPKAD provinsi Sumatera Selatan serta data jumlah kecamatan dan jumlah penduduk tahun 2017-2019 sebanyak 17 dari kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil menunjukkan bahwa pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan kompleksitas, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Secara parsial ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.


Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Kompleksitas dan Kelemahan pengendalian Intern.

Abstract

Mita Tia Ayu Lestari / 222017156 / 2021 / Factors Influencing The Weakness of Intern Control of Local Government Case Studies At the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province.

The formulation of problems in this study is what factors influence the weakness of intern control of local governments. The purpose of this study is to find out the factors that affect the weakness of intern control of local government. The type of research used is associative. The data used is secondary data. The samples in this study are from the findings of intern control weakness cases resulting from audits BPK RI, financial report data from BPKAD South Sumatra province as well as data on the number of sub-districts and the number of residents in 2017-2019 as many as 17 in districts / cities in the region of South Sumatra. Data collection techniques are documentation. The method of data analysis in this study is quantitative. The results of this study were assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS). The results showed that the influence of local government size, local native income, capital expenditure and complexity, jointly influenced the weakness of intern control. Partially the size of local government, local revenues, capital expenditures and complexity affect the weakness of intern control.

Keywords: Local Government Size, Local Revenue (PAD), Capital Expenditure, Complexity and Weakness of Intern Control.

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A105	Mita Tia Ayu Lestari	222017156	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Perubahan terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah masa reformasi di Indonesia, sistem pemerintahan yang semula menggunakan sistem sentralisasi kini berubah menjadi sistem desentralisasi. Adanya sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola daerahnya sendiri. Wewenang dari pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah menunjukkan adanya keyakinan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing (Martani dan Zaelani 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah mengharuskan pemimpin daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang berada di bawah naungannya secara adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, dengan adanya otonomi daerah maka pelayanan publik dari pemerintah bisa menjadi lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah perlu memperhatikan berbagai aspek sesuai dengan kemampuan dari daerahnya masing-masing dalam penyusunan rencana anggaran belanja daerah. Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik yang terkait dengan belanja daerah adalah: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik (Mardiasmo 2018:76).

Pengendalian intern di Indonesia masih sangat minim sekali, banyaknya berita yang sering mengungkapkan mengenai berbagai tindakan penyimpangan ataupun kecurangan yang terjadi di Indonesia diperlukan adanya pengawasan atau pengendalian intern dalam menjalankan otonomi daerah guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan masih sangat sering terjadi didalam sebuah organisasi dikarenakan adanya pengendalian internal yang kurang memadai dalam suatu organisasi. Pengendalian Intern memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi. pemerintah harus mampu menjalankan pengendalian intern yang baik agar memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Kasus yang terjadi dalam perkembangan pengelolaan keuangan negara ini menuntut pemerintah untuk responsif dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian intern yang memadai (Martani dan Zaelani 2011).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (4) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dalam sebuah organisasi baik itu

profit oriented maupun *nonprofit oriented* biasanya terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern yang ada di dalam organisasi tersebut. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern ini mengakibatkan munculnya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Maka untuk mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi khususnya pada pemerintah daerah dilakukan penelitian ini.

Petrovits (2010) lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan. Faktor keduanya diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada. Berdasarkan kedua faktor tersebut maka pengendalian intern sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, diantaranya: ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal dan kompleksitas.

Ukuran pemerintah daerah berbicara mengenai ukuran, maka kita dihadapkan pada masalah seberapa besar dan seberapa kecil objek yang akan kita ukur. Ukuran merupakan suatu entitas yang juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Ukuran pemerintah diukur dari aset yang dimiliki daerah atau jumlah penduduk.

Hartono (2014) menganggap bahwa jumlah penduduk yang banyak pada suatu daerah akan menyebabkan perbedaan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit. Alasan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 28 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk menentukan kebutuhan pendanaan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kelemahan pengendalian intern yaitu jumlah penduduk yang menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan

pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula pendanaan yang akan digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut semakin kompleks.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya.

PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin bagus, pengembangan kehidupan demokrasi, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PAD juga mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, dalam satu sisi pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola daerahnya termasuk pengelolaan pendapatan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan ataupun dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah, namun disisi lain dengan luasnya kewenangan yang dimiliki serta besarnya dana yang dikelola berdampak terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat tingginya kelemahan pengendalian intern di dalam pemerintahan daerah.

Hubungan PAD dengan kelemahan pengendalian intern yaitu semakin banyak jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah, maka membuat masalah pengendalian internal meningkat. Banyaknya sumber pendapatan yang ada disuatu daerah akan menyebabkan meningkatnya kecurangan yang berimbas pada kerugian

suatu daerah.

Kristanto (2009) belanja modal merupakan pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja atau dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Semakin besar anggaran untuk belanja modal pada institusi pemerintah daerah maka risiko kebocoran dari anggaran untuk belanja modal tersebut semakin tinggi. Adanya pengadaan barang fisik pada pemerintah juga menyebabkan seringnya terjadi praktik korupsi dalam proses tendernya. Anggaran yang besar untuk belanja modal akan menyebabkan kesulitan penerapan sistem pengendalian intern sesuai dengan prosedur yang benar.

Hubungan belanja modal dengan kelemahan pengendalian intern yaitu belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Pengadaan barang ini sangat rawan terjadinya kecurangan yang merugikan pemerintah. Banyaknya proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proyek pengadaan tersebut semakin tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah adalah kompleksitas. Kompleksitas dapat diukur atau dihitung dengan jumlah kecamatan atau jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). kompleksitas daerah yang semakin tinggi di dalam sebuah organisasi menyebabkan masalah salah satunya adalah pengendalian intern. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk

setiap divisi yang berbeda. Kompleksitas daerah biasanya dapat dilihat dari jumlah kecamatan.

Hubungan Kompleksitas dengan Kelemahan Pengendalian Intern semakin besar jumlah segmen atau cabang organisasi kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi akan semakin banyak. Kecamatan dalam pemerintah daerah diasosiasikan dengan jumlah segmen dalam perusahaan atau cabang dalam organisasi. Banyaknya jumlah kecamatan di suatu daerah diduga menyebabkan masalah seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, sampai saat pelaporan keuangan.

Menurut hasil pemeriksaan pada permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lembaga pemerintah menurut entitas atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2017 terhadap 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 203 dan pada tahun 2018 terdapat peningkatan kasus SPI paling banyak 298 kasus, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 291 kasus kelemahan SPI. Seperti yang disajikan dalam tabel I.1

Tabel I.1
Jumlah Kelemahan SPI Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017 – 2019

Kabupaten/Kota	Tahun	Kelemahan SPI	Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapata Asli Daerah	Belanja Modal	Kompleksitas
Ogan Komering Ulu	2017	16	5,555206	10,90884067	11,30580895	13
	2018	19	5,561411	11,20285386	11,48947992	13
	2019	16	5,566739	11,09689725	11,49505766	13
Ogan Komering Ilir	2017	5	5,908057	11,4900175	11,70236609	18
	2018	14	5,914622	11,55197333	11,48794162	18
	2019	14	5,920202	11,27920405	11,68796562	18
Muara Enim	2017	8	5,791524	11,20940672	11,55142681	20
	2018	11	5,798417	11,23474858	11,63920966	20
	2019	22	5,804518	11,35694951	11,84217559	22
Lahat	2017	9	5,603679	11,12851054	11,59274657	24

	2018	15	5,608103	11,08552521	11,50200345	24
	2019	16	5,612093	11,04597107	11,53453683	24
Musi Rawas	2017	12	5,595919	11,06069784	10,44827026	14
	2018	19	5,602319	11,08587171	11,56727202	14
	2019	23	5,607643	11,14747831	11,57475142	14
Musi Banyuasin	2017	10	5,799196	11,30897727	11,87346293	14
	2018	15	5,806224	11,32783618	12,01952636	15
	2019	13	5,812302	11,45801659	11,81532614	15
Banyuasin	2017	14	5,920971	11,03245419	11,50668784	19
	2018	18	5,927508	11,04388798	11,3763312	21
	2019	11	5,93303	11,13688376	11,80222104	21
OKU Selatan	2017	8	5,547684	10,62833783	11,38847312	19
	2018	14	5,554501	10,62273714	11,50000874	19
	2019	18	5,559911	10,6759936	11,50259567	19
OKU Timur	2017	19	5,821828	10,81147836	11,50661687	20
	2018	18	5,826498	10,86409396	11,5002118	20
	2019	12	5,83064	10,95676746	11,65621217	20
Ogan Ilir	2017	19	5,623015	11,45255561	11,65574184	16
	2018	20	5,628158	11,30869721	11,51929133	16
	2019	16	5,633059	11,05625927	11,46011707	16
Empat Lawang	2017	8	5,387945	10,54817543	11,30036888	10
	2018	25	5,393652	10,62388204	11,36395938	10
	2019	21	5,398747	10,71890202	11,29710556	10
PALI	2017	11	5,266399	10,75529581	11,60525804	5
	2018	29	5,273126	10,91885154	11,90633194	5
	2019	15	5,278895	10,97141401	11,8484573	5
Musi Rawas Utara	2017	12	5,273314	10,53301485	11,46086541	7
	2018	13	5,279261	10,5521695	11,54245549	7
	2019	22	5,284521	10,73743654	11,5386708	7
Palembang	2017	19	6,210345	11,9513426	11,86424746	18
	2018	22	6,217972	12,02350572	12,02233628	18
	2019	22	6,223818	12,2181802	12,08922058	18
Prabumulih	2017	8	5,260377	11,01840932	11,30473946	6
	2018	15	5,269268	11,05712576	11,08169034	6
	2019	20	5,275701	10,98451831	11,24858333	6
Pagar Alam	2017	17	5,135467	10,717055	11,3481733	5
	2018	20	5,139766	10,79314093	11,30437691	5
	2019	21	5,143614	10,64749394	11,29978299	5
Lubuk Linggau	2017	8	5,354112	10,91775723	11,24540677	8
	2018	11	5,361518	11,06037655	11,36928832	8
	2019	9	5,367688	10,96402379	11,45415004	8

Sumber: Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI

dalam LKPD mengungkapkan kasus kelemahan SPI yang terjadi di 17 kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan mengalami naik turun atau fluktuatif. Banyaknya kasus pengendalian intern yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan ini mengalami peningkatan diduga terjadi karena belum maksimalnya penerapan pengendalian intern pada sektor pemerintahan. Tingginya kasus temuan yang terkait kelemahan pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Saferi dan Erly Mulyani (2020) menggunakan variabel Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, dan Kompleksitas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel yang sama namun peneliti menambahkan variabel Belanja Modal sehingga memiliki hasil penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Hubungan belanja modal dengan kelemahan pengendalian intern karena mudah terjadinya korupsi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti variabel tersebut. Kesimpulannya bahwa semakin besar anggaran belanja modal akan semakin memicu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini juga menggunakan data periode tahun 2017 sampai 2019 sehingga tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan pertimbangan yang ada, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini faktor apa saja yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern terhadap pemerintah daerah.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pengendalian intern pada pemerintah daerah, dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pengendalian intern, serta sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Kurniawan. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Anwar Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019*. www.bpkad.sumselprov.go.id diakses pada 1 mei 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2017-2019*. www.bpk.go.id diakses pada 28 April 2021..
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Tahun 2017-2019*. www.sumsel.bps.go.id diakses 2 mei 2021.
- Diah. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis*. NoerFikri, Palembang.
- Dian, Eka R. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No. 4.
- Fauza, Nailatul. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah se Sumatera)*. *Jurnal Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 21. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim dan Abdullah. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 2.
- Hanifatuz, Samhah. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 2.
- Hartono. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi seIndonesia tahun 2011*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Kristanto. 2009. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern*. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol. 9, No. 1.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martani dan Zaelani. 2011. *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 2, No. 1.

- M. Saferi dan Erly, Mulyani. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1, Edisi Enam. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). The Causes and Consequences on Internal Control Problems in Non profit Organizations.*
- PMK No. 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akuntansi Standar.
- PMK No. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Prof. Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Puspitasari, Titus. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi Sarjana. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Romie, Priyastama. 2017. SPSS Pengolahan Data & Analisis Data. Yogyakarta: Start Up.
- Saputro, E. A., & Mahmud, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, Vol 4, No. 1.
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Windhu Putra. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Penerbit Rajawali Pers, Depok
- V.Wiratna. 2020. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru, Yogyakarta.

